

Ujian PDI

oleh Ariel Heryanto

Seandainya yang melanda PDI merupakan konflik internal murni, maka tak ada yang patut kita sesalkan atau herankan. Hal itu bukan saja wajar, tetapi juga menyehatkan. Konflik yang tidak menghancurkan biasanya akan memperkuat ikatan sosial. Konflik menguji kualitas organisasi, anggota serta pimpinannya.

Bagaimana seandainya yang terjadi di PDI bukan konflik internal? Atau seandainya bukan cuma, atau bukan terutama konflik internal? Pertanyaan ini wajar, minimal karena dua alasan kuat.

Alasan pertama, PDI tidak hidup jauh di hutan belukar, terpisah dari dinamika masyarakat luas. Setiap pori-pori tubuh PDI dan setiap hembusan napasnya bertumpang tindih dengan kehidupan berbagai pihak lain. Apa pun yang terjadi dengan PDI sedikit atau banyak berdampak terhadap pihak di luarnya.

Disengaja atau tidak, PDI dengan figur Megawati sebagai pucuk pimpinan, merupakan sebuah ancaman bagi mereka yang diuntungkan oleh status quo. Banyak yang menangis bila PDI runtuh. Tetapi bukannya tidak ada yang diuntungkan apabila PDI kacau balau, misalnya diakibatkan oleh pertikaian internal, atau yang seakan-akan internal.

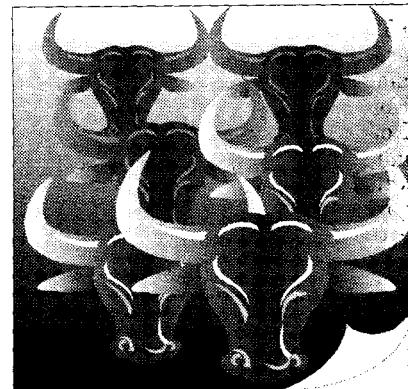
Alasan kedua, yang selama ini kelihatan paling bersemangat menyatakan pendapat tentang kemelut atau kongres PDI, justru tokoh-tokoh di luar PDI. Gejala ini mencurigakan, terlepas dari apa isi pernyataan mereka, apa motivasinya, dari OPP mana mereka berasal, atau dari pihak mana mereka menerima gaji bulanan. Betapa kontras sikap demikian dengan penampilan anggun Megawati yang selama ini bersikap hemat bicara!

Kemelut di tubuh PDI tidak mungkin seratus persen merupakan intervensi eksternal. Seandainya itu yang terjadi, maka ada garis pemisah yang tegas di antara seluruh kekuatan PDI yang bersatu padu di satu kubu melawan kekuatan kubu lain di luarnya. Jika demikian masalahnya menjadi hitam putih. Kira-kira mirip dengan suasana yang terjadi di Myanmar saat ini.

Apa yang terjadi di Indonesia jauh lebih rumit dan kaya warna-warni. Tetapi tidak mustahil perbedaan di kedua negara itu akan menyempit. Entah karena yang di Myanmar akan berubah semakin mirip dengan Indonesia. Atau sebaliknya yang di Indonesia semakin mirip Myanmar. Atau kedua negara berubah menuju ke situasi di tengah-teengah.

Di negeri Myanmar ada Partai Liga Nasional untuk demokrasi (*National League for Democracy*, atau NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Mereka pernah memenangkan pemilihan umum, tetapi kemenangan mereka dibatalkan sebuah junta militer. Sejak itu kekuasaan negeri dipegang dengan modal represi oleh junta militer yang menaikan diri dewan pemilihan ketertiban dan hukum negara.

Perbandingan di kedua negeri ini



layak dicermati lebih jauh. Penguasa junta militer Myanmar pernah menyatakan keinginan berguru pada tata politik Orde Baru di Indonesia. Entah kebetulan sejarah atau bukan, baik NLD maupun PDI sama-sama dipimpin seorang perempuan gagah. Keduanya sama-sama punya ayah yang menjadi bapak bangsa dan negarawan besar Asia di abad 20 ini.

Salah satu penyebab berbedanya situasi Indonesia dan Myanmar sementara ini adalah perbedaan tingkat kekerasan terhadap oposisi. Di Myanmar penindasan terhadap oposisi dilakukan jauh lebih secara kasar daripada yang sementara ini kita saksikan di Indonesia. Tentu saja suasana di masing-masing negara itu bisa berubah lebih keras atau sebaliknya.

Seandainya dalam hari-hari mendatang ini represi secara kasar mengintervensi PDI, atau Megawati secara individu, akibatnya bisa bertolak belakang dari yang direncanakan penguasa. Ini sama dengan kampanye politis besar-besaran bagi PDI oleh pihak yang tak suka PDI. Hasilnya diancam oleh PDI dan Mega sendiri.

Khalayak umum yang apolitis akan menumpahkan banir simpati kepada PDI dan Megawati. Juga masyarakat internasional. Bukan karena mereka suka politik atau pendukung PDI/Megawati. Mereka membela moralitas, keadilan, dan demokrasi yang mungkin tanpa disengaja akan ikut menjadi korban-sampangan. Itulah yang terjadi ketika tiga media di Jakarta dibreidel. Atau ketika sebuah keluarga di Bekasi dirampok dan diperkosa secara kejam.

Sejarah telah mengajarkan itulah nasib yang dinikmati NLD dan Aung San Suu Kyi. Mereka menjadi primadona demokrasi di mata publik tanpa berpot-repot berkampanye. Cukup tenang saja, persis seperti sikap yang sudah dipilih Megawati selama ini.

Ada implikasi lain bila kongres PDI dipaksakan pihak eksternal atau hanya karena adanya tuntutan sekelompok pihak internal. Tuntutan dan konflik serupa bisa muncul bukan saja terhadap OPP lain, tetapi langsung terhadap lembaga tertinggi di negara ini. Setiap logika politik dapat digunakan penguasa terhadap oposisi, tetapi juga diambil alih oposisi untuk dilempar balik terhadap penciptanya. Ibarat senjata makan tuan.

Penulis adalah budayawan tinggal di Salatiga